

RANCANG BANGUN APLIKASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN MASYARAKAT MISKIN MENURUT KRITERIA KEMENSOS (Studi Kasus: Kelurahan Tonjong)

Ade Bastian ^[1], Nadya Pratiwi Aisha Bakhtiar ^[2]

^[1] Program Studi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Majalengka,
Jln. KH. Abdul Halim. No.103 Majalengka 45416
Email: bastiandicaprio@gmail.com

^[2] Program Studi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Majalengka,
Jln. KH. Abdul Halim. No.103 Majalengka 45416
Email: nadyapab@gmail.com

ABSTRAK

Sampai saat ini kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka melakukan pendataan keluarga miskin masih menggunakan cara manual, yaitu pengisian form dalam bentuk kertas yang membutuhkan waktu yang lama. Pengambilan keputusan pun dilakukan seringkali tidak berdasarkan ketentuan yang ada. Maka diperlukan suatu sistem pendukung keputusan dengan mengambil kriteria dari Kementerian Sosial dan masyarakat Republik Indonesia untuk menentukan apakah suatu keluarga dikategorikan miskin atau tidak agar penilaian dapat dilakukan dengan lebih objektif. Dari 14 kriteria yang ada hanya 10 yang diterapkan dalam sistem. Suatu keluarga dikatakan miskin, jika 9 atau lebih kriteria terpenuhi. Sistem ini dibuat dalam bentuk aplikasi dekstop dengan menggunakan bahasa pemrograman java, database Xampp, dan tools NetBeans. Dalam pengembangan sistem digunakan metode RUP (*Rational Unified Process*). Hasil dari sistem pendukung keputusan ini adalah data keluarga dalam bentuk digital dan keputusan penentuan miskin atau tidak miskin sebuah keluarga secara komputerisasi. Sistem ini diharapkan dapat membantu pihak kelurahan Tonjong memperbaiki sistem yang sebelumnya manual dengan sistem dekstop yang lebih efektif dalam proses pelaksanaannya.

Kata Kunci: *Sistem Pendukung Keputusan, Masyarakat Miskin, kriteria KEMENSOS.*

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan digambarkan sebagai kondisi dimana rendahnya pendapatan, atau tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang. Sedangkan definisi kemiskinan yang digunakan BPS adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak [2].

Terdapat dua cara untuk mengukur tingkat kemiskinan, yakni pendapatan dan aset. Pendapatan mengacu pada jumlah uang yang dihasilkan seseorang setiap tahunnya, sedangkan aset mengacu pada total kekayaan yang dimiliki seseorang, seperti rumah/bangunan, uang tunai, saham, sertifikat, dan sejenisnya [6].

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah sistem berbasis komputer interaktif yang membantu para pengambil keputusan untuk menggunakan data dan berbagai model untuk memecahkan masalah-masalah tidak terstruktur [8].

Kementerian Sosial Republik Indonesia (KEMENSOS) dahulu Departemen Sosial (Depsos) adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang sosial. Kewenangan KEMENSOS dalam verifikasi dan validasi data kemiskinan UU no.13 tahun 2011 adalah Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan validasi ditetapkan oleh Menteri sebagai dasar bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan/pemberdayaan (Pasal 10 ayat 1 dan 2). Menurut keputusan menteri sosial Republik Indonesia nomor 146/HUK/2013 tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu terdapat 14 kriteria dalam menentukan masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu. Hasil putusan tersebut dapat digunakan salah satunya untuk melaksanakan program pemerintah seperti yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang tidak mampu.

Kelurahan Tonjong merupakan suatu wilayah di kecamatan Majalengka yang sebagian masyarakatnya masih membutuhkan bantuan pemerintah. Dari data yang diperoleh melalui proses observasi dan wawancara dengan pihak kelurahan Tonjong terdapat 1151 kepala keluarga yang 224 diantaranya tercatat sebagai kategori keluarga miskin. Penentuan masyarakat miskin tersebut masih dilakukan secara manual dan belum mengacu sepenuhnya pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Oleh sebab itu perancangan sistem pendukung keputusan untuk menentukan masyarakat miskin dengan kriteria yang diterapkan dari Kementerian Sosial diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu tujuan dari pembuatan aplikasi ini dapat membantu mempercepat proses pendataan dan penentuan masyarakat miskin.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Rancang Bangun

Rancang bangun merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman yang didasarkan pada spesifikasi desain untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan[3]. Rancang bangun juga dapat diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan hasil analisa ke dalam sebuah perangkat lunak kemudian menciptakan suatu sistem atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Rancang bangun memiliki tujuan diantaranya menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik.

2.2. Aplikasi

Aplikasi merupakan *software* yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk pekerjaan atau tugas-tugas tertentu seperti penerapan, penggunaan dan penambahan data. Aplikasi dapat diartikan juga sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong manusia dalam melakukan tugas. Aplikasi adalah penggunaan dalam dalam suatu komputer, intruksi (*intruccion*) atau pernyataan (*statement*) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses *input* menjadi *output*[5].

2.3. Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau *decision support system* (DSS) didefinisikan sebagai suatu sistem informasi untuk membantu manajer level menengah untuk proses pengambilan keputusan setengah terstruktur (semi structured) supaya lebih sefektif dengan menggunakan model-model analitis dan data yang tersedia. Pendapat lain menyatakan, Sistem Penunjang Keputusan (SPK) adalah salah satu cara mengorganisir informasi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam membuat keputusan[4].

2.4. Kriteria Sistem Pendukung Keputusan

Sistem pendukung keputusan dirancang secara khusus untuk mendukung seseorang yang harus mengambil keputusan-keputusan tertentu [1]. Berikut ini beberapa kriteria sistem pendukung keputusan.

1. Interaktif

Sistem pendukung keputusan memiliki user interface yang komunikatif sehingga pemakai dapat melakukan akses secara cepat ke data dan memperoleh informasi yang dibutuhkan.

2. Fleksibel

Sistem pendukung keputusan memiliki sebanyak mungkin variabel masukan, kemampuan untuk mengolah dan memberikan keluaran yang menyajikan alternatif-alternatif keputusan kepada pemakai.

3. Data Kualitas

Sistem pendukung keputusan memiliki kemampuan untuk menerima data kualitas yang dikuantitaskan yang sifatnya subyektif dari pemakai nya, sebagai data masukan untuk pengolahan data. Misalnya terhadap kecantikan yang bersifat kualitas, dapat dikuantitaskan dengan pemberian bobot nilai seperti 75 atau 90.

4. Prosedur Pakar

Sistem pendukung keputusan mengandung suatu prosedur yang dirancang berdasarkan rumusan formal atau juga berupa prosedur kepakaran seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan suatu bidang masalah dengan fenomena tertentu.

2.5. Kemiskinan

Menurut KBBI kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa dimiliki seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum. Hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sandang pangan papan. Entah karena langka didapat atau karena memang rendahnya daya beli untuk mencukupi sandang pangan papan tersebut [7].

2.6. Kriteria Kemiskinan

Adapun kriteria penentuan masyarakat miskin menurut KEMENSOS:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plaster
4. Tidak memiliki tempat buang air besar/ bersama-sama dengan rumah lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai/ air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel baju pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dikatakan miskin.

2.7. RUP (*Rational Unified Process*)

RUP (*Rational Unified Process*) adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan berulang-ulang, fokus pada arsitektur, lebih diarahkan berdasarkan penggunaan kasus [5]. RUP memiliki empat fase atau tahap yang dapat dilakukan pula secara iteratif. Berikut penjelasan setiap fase pada RUP:

1. *Inception* (permulaan)

Tahap ini lebih pada memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan dan mengidentifikasi kebutuhan akan sistem yang akan dibuat.

2. *Elaboration* (perencanaan)

Tahap ini merupakan perencanaan arsitektur sistem, juga pada analisis dan desain sistem serta implementasi sistem yang fokus pada purwarupa sistem.

3. *Construction* (kontruksi)

Tahap ini fokus pada pengembangan komponen dan fitur-fitur sistem. Tahap ini lebih pada implementasi dan pengujian sistem perangkat lunak pada kode program.

4. *Transition* (transisi)

Tahap ini merupakan instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh *admin*. Tahap ini juga termasuk pada pelatihan *admin*, pemeliharaan dan pengujian sistem.

3. METODE PELAKSANAAN

Dalam pengembangan sistem pakar penentuan masyarakat miskin ini menggunakan metode RUP (*Rational Unified process*) dimana setiap tahapan pada metode ini adalah sebagai berikut:

1. *Inception* (permulaan)

Analisis sistem yang usulkan merupakan sistem pendukung keputusan penentuan masyarakat miskin berbasis dekstop, dimana pengambilan keputusan berdasarkan ketentuan KEMENSOS. Sistem yang akan dibuat nantinya akan menampilkan hasil analisis berupa miskin atau tidak miskin dari 10 kriteria penentuan masyarakat miskin.

2. *Elaboration* (perencanaan)

Akan ada beberapa bagian sistem diantaranya *input*, proses, simpan dan *output*. *Input* adalah bagian dimana user (staf kelurahan) memasukan data yang diperlukan. Proses adalah sistem melakukan analisis untuk menghasilkan sebuah keputusan. Simpan adalah data yang telah diproses dimasukan pada sebuah database. Dan *output* adalah hasil dari dari tahap sebelumnya dapat dicetak menjadi sebuah informasi yang valid.

3. *Construction* (kontruksi)

Tahap ini lebih pada pembuatan aplikasi dengan menggunakan aplikasi NetBeans, dan Xampp. Dan pengujian pengujian manual dan sistem.

3.1. Analisis Data

Kementrian Sosial Republik Indonesia menetapkan masyarakat miskin dengan mengacu pada 14 kriteria yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, tetapi hanya 10 yang diambil sebagai acuan untuk sistem ini. Untuk mempermudah

proses analisa pohon kepakaran dan perancangan pada proses selanjutnya maka 10 kriteria tersebut diberikan kode. Hasil pengkodean kriteria masyarakat miskin dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Pengkodean Kriteria

| KODE | KRITERIA |
|------|--|
| Y | Golongan masyarakat miskin |
| A | Luas lantai |
| B | Jenis lantai |
| C | Jenis dinding |
| D | Tempat buang air besar |
| E | Sumber penerangan |
| F | Sumber air minum |
| G | Bahan bakar untuk memasak |
| H | Mengonsumsi daging/ susu/ ayam |
| I | Jumlah pendapatan |
| J | Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga |

Masyarakat dinyatakan miskin jika memenuhi 9 atau lebih dari kriteria yang ada. Maka terdapat beberapa kemungkinan yang akan muncul dalam proses identifikasi,

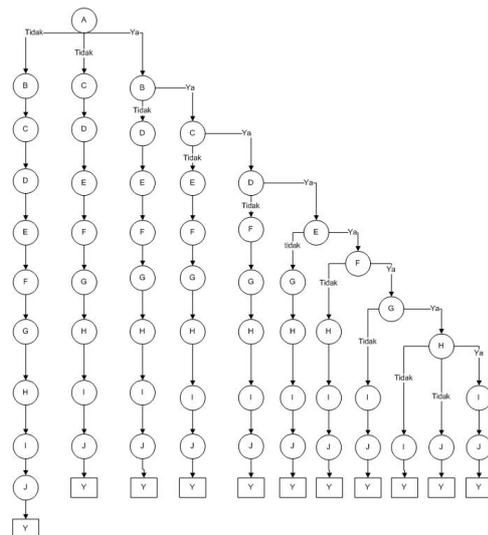
- 1 : JIKA A B C D E F G H I dan J terpenuhi MAKA Y
- 2 : JIKA A B C D E F G H dan I terpenuhi MAKA Y
- 3 : JIKA A B C D E F G H dan J terpenuhi MAKA Y
- 4 : JIKA A B C D E F G I dan J terpenuhi MAKA Y
- 5 : JIKA A B C D E F H I dan J terpenuhi MAKA Y
- 6 : JIKA A B C D E G H I dan J terpenuhi MAKA Y
- 7 : JIKA A B C D F G H I dan J terpenuhi MAKA Y
- 8 : JIKA A B C E F G H I dan J terpenuhi MAKA Y
- 9 : JIKA A B D E F G H I dan J terpenuhi MAKA Y
- 10 : JIKA A C D E F G H I dan J terpenuhi MAKA Y
- 11 : JIKA B C D E F G H I dan J terpenuhi MAKA Y

Dari pengkodean diatas barulah dibuat sebuah tabel aturan (*rule*). Tabel 2 merupakan aturan penetapan masyarakat miskin dimana terdapat 11 kemungkinan terjadi. Sebuah keluarga dikategorikan masyarakat miskin jika memenuhi salah satu dari aturan tersebut. Setiap kriteria memiliki nilai 1 jika termasuk kedalam kategori miskin.

Tabel 2. Aturan penentuan masyarakat miskin

| RULE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| R3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| R4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| R5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| R6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| R11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

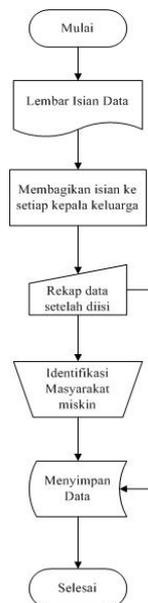
Dari tabel aturan diatas maka dapat dibuat pohon kepakaran masyarakat miskin seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Pohon Pakar

3.2. Analisis Sistem

Pada sistem yang sedang berjalan pihak kelurahan melakukan pendataan kepada setiap kepala keluarga dengan menggunakan kertas isian seputar keadaan rumah tangga. Setelah diisi dilakukan rekap data secara komputerisasi yang disimpan pada sebuah *disk*. Proses identifikasi masyarakat miskin masih dilakukan oleh staf secara manual dengan melihat hasil dari pengisian data tadi. Setelah didapat hasilnya masyarakat yang tergolong miskin dipisahkan dari data keseluruhan. Gambar 2 merupakan *flowchart* sistem yang sedang berjalan.



Gambar 2. Sistem yang sedang berjalan

Sedangkan untuk sistem yang diusulkan, staf kelurahan adalah sebagai *user*. Dimana proses identifikasi dilakukan secara otomatis oleh sistem, *user* hanya perlu memasukkan data yang diperlukan. Hasil dapat disimpan dan dicetak sesuai data yang dibutuhkan. Gambar 3 merupakan *flowchart* sistem yang akan diusulkan.

Sistem

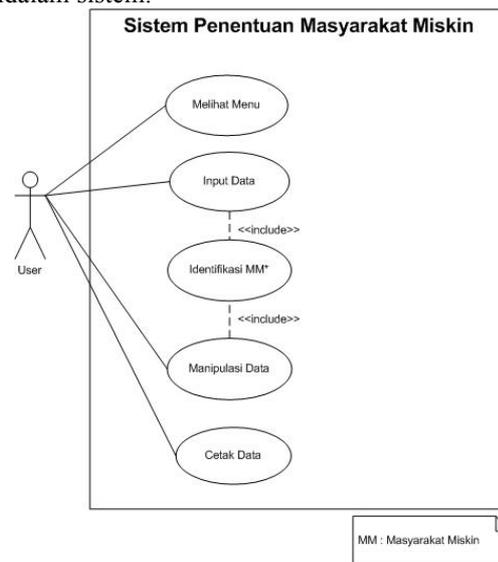


Gambar 3. Sistem yang diusulkan

4. PERANCANGAN

4.1. Use Case

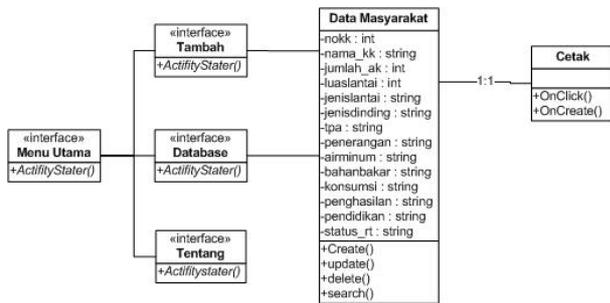
Fungsional sistem digambarkan dengan usecase diagram seperti pada gambar 4. Dimana aktor yang terlibat terdiri dari user (staf kelurahan), dan sistem (aplikasi sistem pakar penentuan masyarakat miskin). Aktor yang berada di luar sistem tersebut yaitu user. Sedangkan aplikasi sistem pakar berada didalam sistem.



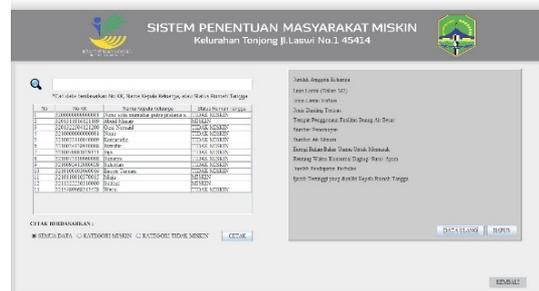
Gambar 4. Use Case Diagram

4.2. Class Diagram

Dalam sistem pakar penentuan masyarakat miskin akan terdapat 6 kelas. Diantaranya menu utama, tambah, database, tentang, data masyarakat dan cetak. Menu utama adalah kelas yang dapat menghubungkan keseluruhan bagian aplikasi melalui menu-menu yang tersedia didalamnya. Tambah adalah menu aplikasi untuk menambahkan database baru. Database merupakan menu aplikasi untuk melihat data yang sudah tersimpan. Tentang merupakan menu untuk melihat deskripsi aplikasi. Data masyarakat adalah kelas yang berisi informasi tentang data masyarakat. Kelas cetak adalah kelas yang menampilkan halaman cetak dari data masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Class Diagram



Gambar 7. Tampilan Data Masyarakat

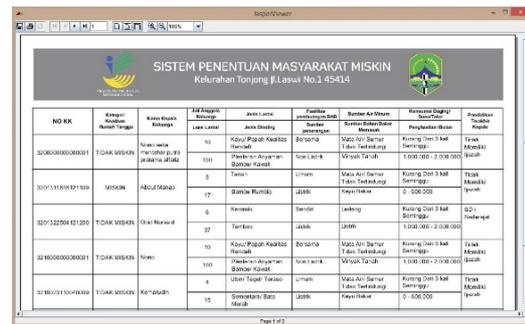
5. IMPLEMENTASI

Tampilan aplikasi sistem penentuan masyarakat miskin ini terdapat beberapa halaman seperti menu utama, database masyarakat, data umum, halaman kriteria masyarakat miskin, halaman cetak, dan halaman informasi aplikasi. Berikut ini tampilan aplikasi penentuan Masyarakat Miskin sesuai dengan rancangan sebelumnya yang telah dibuat : Halaman menu utama dirancang agar dapat berhubungan dengan seluruh halaman yang ada didalam sistem. Hasil dari rancangan menu utama dapat dilihat seperti pada gambar 6.



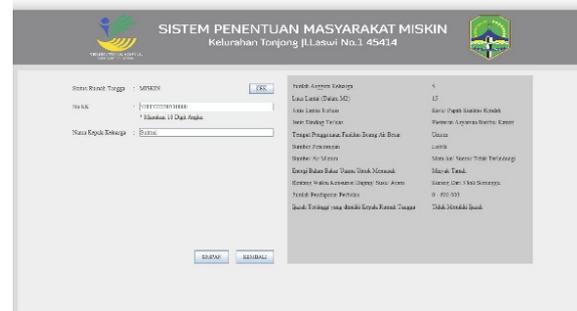
Gambar 6. Tampilan Menu Utama

Halaman data masyarakat merupakan tampilan data masyarakat yang telah tersimpan sebelumnya. Selain menampilkan seluruh data, data setiap kepala keluarga masih dapat dilihat pada halaman yang sama. Selain itu pada halaman ini user dapat melakukan cetak data sesuai dengan yang dibutuhkan. Seluruh data, hanya data masyarakat miskin atau hanya data masyarakat tidak miskin. Sehingga tampilan halaman data masyarakat seperti pada gambar 7 dan gambar 8.



Gambar 8. Tampilan Halaman Cetak

Halaman data umum merupakan halaman dimana user memasukan data baru ataupun pembaruan data. Data yang dapat dimasukan merupakan data umum seperti no kk, dan nama kepala keluarga. Adapun data kategori miskin atau tidak miskin ini terisi secara otomatis oleh sistem setelah user memasukan data khusus berupa kriteria penentuan masyarakat miskin. Tampilan halaman data umum seperti pada gambar 9 berikut :



Gambar 9. Tampilan Data Umum

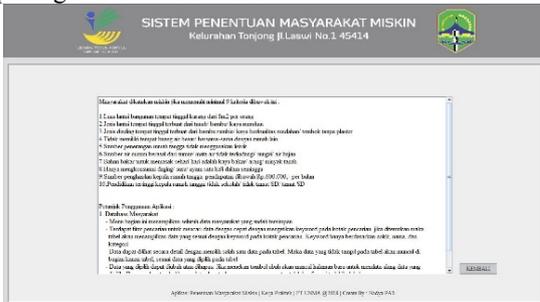
Halaman kriteria beisi inputan data kriteria masyarakat miskin. Setelah mengisi data pada halaman ini sistem akan mengolah data tersebut menjadi kategori miskin atau tidak miskin. Nilai akhir yang akan dikeluarkan sistem antara 1 – 10 dan kategori miskin atau tidak miskin. Hanya kategori yang tersimpan dalam database sedangkan bobot nilai kemiskinan hanya ditampilkan berupa

kotak pesan sebagai informasi. Tampilan halaman kriteria dapat dilihat pada gambar 10 sebagai berikut :



Gambar 10. Tampilan Halaman Kriteria

Informasi seluruh aplikasi dapat dilihat melalui menu tentang. Tampilan halaman tentang seperti pada gambar 11 berikut :



Gambar 11. Tampilan Halaman Tentang

6. PENGUJIAN PENENTUAN KATEGORI

Pada tabel 3 berikut ini merupakan hasil pengujian secara manual dan hasil analisa sistem pendukung keputusan penentuan masyarakat miskin.

Tabel 3. Pengujian

| Kategori | Nama Kepala Keluarga : Abdul Manap | Skor |
|----------|---|------|
| A | Luas Lantai perorang = luas lantai keseluruhan / Jumlah anggota keluarga 17 m ² / 5 orang = 3,4 m ² / orang | 1 |
| B | Tanah | 1 |
| C | Bambu rumbia | 1 |
| D | Umum | 1 |
| E | Listrik | 0 |
| F | Mata air/ sumur tak terlindungi | 1 |
| G | Kayu bakar | 1 |
| H | Kurang dari 3x seminggu | 1 |
| I | 0 – 600.000 | 1 |
| J | Tidak memiliki ijazah | 1 |

| Kategori | Nama Kepala Keluarga : Abdul Manap | Skor |
|---------------------------|--|---------------------|
| | Total Skor | |
| Status | | Miskin |
| Hasil Dalam Sistem | | √ |
| Kategori | Nama Kepala Keluarga : Ocid Nursaid | Skor |
| A | Luas Lantai perorang = luas lantai keseluruhan / Jumlah anggota keluarga 37 m ² / 6 orang = 6,1 m ² / orang | 1 |
| B | Keramik | 0 |
| C | Tembok | 0 |
| D | Sendiri | 0 |
| E | Listrik | 0 |
| F | Ledeng | 0 |
| G | Listrik | 0 |
| H | Kurang dari 3x seminggu | 1 |
| I | 1.000.000 - 2.000.000 | 0 |
| J | SD / Sederajat | 1 |
| Total Skor | | 3 |
| Status | | Tidak Miskin |
| Hasil Dalam Sistem | | √ |
| Kategori | Nama Kepala Keluarga : Komarudin | Skor |
| A | Luas Lantai perorang = luas lantai keseluruhan / Jumlah anggota keluarga 15 m ² / 4 orang = 3,75 m ² / orang | 1 |
| B | Ubin | 0 |
| C | Bata Merah | 1 |
| D | Umum | 1 |
| E | Listrik | 0 |
| F | Mata air/ sumur tak terlindungi | 1 |
| G | Kayu bakar | 1 |
| H | Kurang dari 3x seminggu | 1 |
| I | 0 – 600.000 | 1 |
| J | Tidak memiliki ijazah | 1 |
| Total Skor | | 8 |
| Status | | Tidak Miskin |
| Hasil Dalam Sistem | | √ |

| Kategori | Nama Kepala Keluarga : Abdul Manap | Skor |
|--------------------|--|--------|
| | | |
| Kategori | Nama Kepala Keluarga : Misja | Skor |
| A | Luas Lantai perorang = luas lantai keseluruhan / Jumlah anggota keluarga 15 m ² / 4 orang = 3,75 m ² / orang | 1 |
| B | Bambu | 1 |
| C | Plesteran Anyaman Bambu | 1 |
| D | Bersama | 1 |
| E | Listrik | 0 |
| F | Mata air/ sumur tak terlindungi | 1 |
| G | Kayu bakar | 1 |
| H | Kurang dari 3x seminggu | 1 |
| I | 0 – 600.000 | 1 |
| J | Tidak memiliki ijazah | 1 |
| Total Skor | | 9 |
| Status | | Miskin |
| Hasil Dalam Sistem | | √ |
| Kategori | Nama Kepala Keluarga : Sultoni | Skor |
| A | Luas Lantai perorang = luas lantai keseluruhan / Jumlah anggota keluarga 15 m ² / 5 orang = 3 m ² / orang | 1 |
| B | Papan Kualitas Rendah | 1 |
| C | Anyaman Bambu | 1 |
| D | Umum | 1 |
| E | Listrik | 0 |
| F | Mata air/ sumur tak terlindungi | 1 |
| G | Minyak Tanah | 1 |
| H | Kurang dari 3x seminggu | 1 |
| I | 0 – 600.000 | 1 |
| J | Tidak memiliki ijazah | 1 |
| Total Skor | | 9 |
| Status | | Miskin |
| Hasil Dalam Sistem | | √ |

7. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengujian yang sudah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian

dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Masyarakat Miskin Menurut Kriteria KEMENSOS” adalah Sistem penentuan masyarakat miskin berbasis dekstop yang dibuat menggunakan tools NetBeans, database MySQL sebagai media penyimpanan data, dan iReport untuk mencetak data. Hasil keputusan sistem terbagi menjadi 2 kategori yaitu miskin dan tidak miskin. Kategori miskin atau tidak miskin dihasilkan dari pengolahan data 10 kriteria KEMENSOS yang dimasukkan kedalam sistem dengan menggunakan bahasa pemrograman java. Nilai yang dihasilkan antara 1-10 dimana jika nilai lebih dari 9 maka dikategorikan kedalam masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aminudin, n., & Sari, i. a. (2017). *sistem pendukung keputusan (DSS) penerimaan bantuan program keluarga harapan (PKH) pada desa bangun rejo kec. punduh pidada pesawaran dengan menggunakan metode analytical hierarcy process (AHP)*. Lampung: STMIK Pringsewu Lampung.
- [2] Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- [3] Fitriani, D. (2017). *Sistem pendukung keputusan penentuan keluarga miskin menggunakan logika fuzzy tsukamoto*. Majalengka: Perpustakaan Universitas Majalengka.
- [4] Lestari, N., Handayani, R., & SY, Y. J. (2017). Implementasi Sistem Informasi Untuk Penunjang Pengambilan Keputusan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Desa. *SISFOTEK*.
- [5] Rosa, A., & Shalahuddin, M. (2013). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.
- [6] Suharto, E. (2007). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [7] Sukmaindrayana, A., & Hidayat, H. A. (2015). Sistem Pendukung Keputusan Untuk Klasifikasi Rumah Tangga Ini. *STMIK DCI*.
- [8] Yurnas, D. O., Sarwinda, D., & Muttakin, F. (2015). Pengelompokan Penerima Bantuan Kesejahteraan Masyarakat dengan Pendekatan Data Mining Terintegrasi Sistem Pendukung Keputusan. *SENATKOM*.